

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Citra aditya Bakti. Bandung.
- Arief Sidharta. 2008. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju. Bandung.
- Bambang Marhijanto. 2004. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*. Bintang Ilmu. Surabaya.
- F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung.
- Ghansham Anand. 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta. Erlangga.
- Habib Adjie. 2018, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Refika Aditama. Bandung.
- _____, 2013, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.

Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur.

Ira Koesomawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Kenotarian Raih Asa Sukes*, Jakarta.

Komar Andasasmita, 1984, *Notaris I*, Sumur Bandung. Bandung.

Mariam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

M. Nur Kasaid, 1999, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nur Basuki Winarno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Lakbang Mediatama. Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta.

_____, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.

Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.

_____. 2005. *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press

R. Atang Ranoemihardja, 2003, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung.

R. Soegondo Notodisoerjo. 2002. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali. Jakarta.

Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo. Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

_____. 2013. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Rajawali Pers. Jakarta.

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sri Mamudji. 20017. *Metode penelitian dan Penulisan Hukum*, Universitas Indonesia. Jakarta.

Suhrawadi K. Lubis. 1994. *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Suprayitno, 2017, Beberapa Permasalahan Umum Notaris Terkait Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Print remaja, Surabaya.

Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Udin Narsudin, 2018, *Persoalan Substansi Notaris Dan PPAT Dalam Praktek*, CV.Kumbro, Jakarta.

Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

C. Jurnal

Dedy Pramono, 2015. "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Lex Jurnalica* Vol. 12 No. 3.

Enju Juanda, 2016, Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia, *Galuh Justisi*, Volume 4 Nomor 1.

Evi Apita Maya, 2017. Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume. 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Giovanni Karilla Ayu, 2020, Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Akta Notaris Atas Pencabutan Sertifikat Hak Milik, *Jurnal Notary Indonesian* Vol. 2 No.3.

- Hermawan Udi. 2017. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3 Fakultas Hukum UNISSULA.
- Mardiyah dan I Ketut Rai Setiabudhi, 2017, Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Acta Comitas*, Volume 3 Nomor 2, 20017. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.
- Nurjannah, Aminuddin. 2018. Analisis Hukum Terhadap Putusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris, *Riau Law Jurnal*, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Riau. Riau
- Sergio Saeh. Kajian Hukum Terhadap Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding Ditinjau Dari Pasal 1233 KUHPerdata. *Jurnal Lex Privatum*, Volume 4 Nomor 4. 2021. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Semet G, 2015. "Proses Penyidikan Terhadap Pelanggaran Dalam Pembuatan Akta Oleh Notaris", *Lex Et Societatis*, Vol 3 No. 7. Fakultas Hukum Unsrat.
- Sony Nurul Akhmad, 2019, Kekuatan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Untuk Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3 No. 1.
- Syamsir, Elita Rahmi, dan Yetniwati, 'Prospek Cyber Notary Sebagai Media penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris', *Recital Review*, Volume 3 Nomor 2, 2020. Fakultas Hukum Univeristas Jambi. Jambi.